



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 2 NOMOR 1 (MEI 2021)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

ANALISIS KOMPARASI KESEJAHTERAAN PENDUDUK PROVINSI: STUDI KASUS JAWA BARAT, JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR

Andi Rustandi^{a*}, Dwi Hastuti Lestari Komarlina^b

^{a,b}Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

*andirustandi@unsil.ac.id

Diterima: Februari 2021. Disetujui: April 2021. Dipublikasikan: Mei 2021.

ABSTRACT

The imbalance of economic welfare between provinces can be analyzed, among other things, from the variation lag gap between income per capita and inflation. The research was carried out by observing the inequality in the provinces of West Java, Central Java and East Java, with the aim of knowing: the variations in per capita income of the population; variation in inflation; the comparison of the variation gap in inflation and per capita income of the population in those areas. The study used a descriptive analysis method by analyzing the coefficient of variation in per capita income and inflation as parameters. Comparison of the gap between the coefficient of variation in inflation and per capita income is analyzed to observe the existing welfare of the people of the three provinces. The results obtained from the study: (a) The average variation / fluctuation of income per capita of the population of West Java is more varied (fluctuating) than the average compared to the average variation in per capita income of the population of East Java and Central Java; (b) Variation / fluctuation of inflation in East Java is smaller so that it is considered that the average development rate of the expensive level in East Java is relatively lower than that of Central Java and West Java; (c) The average lag gap of inflation and the average per capita income of the population is actually higher than the percentage of per capita income, so that the welfare of the population in West Java, Central Java and East Java is considered to be less empowered and not prosperous.

Keywords: *Per Capita Income, Inflation, Variation, Prosperity.*

ABSTRAK

Ketimpangan kesejahteraan penduduk antarprovinsi dapat diantaranya dapat dianalisis dari *lag gap* variasi antara pendapatan perkapita dengan inflasi. Penelitian dilakukan dengan pengamatan ketimpangannya pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dengan tujuan untuk mengetahui: Variasi pendapatan per kapita Penduduk; Variasi inflasi; dan untuk menganalisis komparasi gap variasi inflasi dan pendapatan perkapita penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penelitian menggunakan metoda analisis deskriptif dengan menganalisis parameter koefisien variasi pendapatan perkapita serta inflasi. Komparasi gap antara parameter koefisien variasi inflasi dengan pendapatan perkapita, digunakan untuk mengamati eksisting kesejahteraan masyarakat ketiga provinsi tersebut. Dari penelitian diperoleh hasil : (a) Rata-rata variasi/fluktuasi pendapatan perkapita penduduk Jawa Barat lebih bervariasi (fluktuatif) dari rata-ratanya dibandingkan rata-rata variasi pendapatan perkapita penduduk Jawa Timur dan Jawa Tengah; (b) Variasi/fluktuasi inflasi di Jawa Timur lebih kecil sehingga dianggap rata-rata perkembangan tingkat kemahalan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibanding dibanding Jawa Tengah

dan Jawa Barat; (c) *Lag gap* rerata inflasi dan rerata pendapatan perkapita penduduk ternyata persentase inflasinya lebih tinggi dibanding persentase pendapatan perkapita, sehingga dimaknai kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dianggap kurang berdaya dan tidak sejahtera.

Kata Kunci: Pendapatan Perkapita, Inflasi, Koefisien Variasi, Kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah serta dapat digunakan sebagai indikator mengukur kesejahteraan penduduk. Menurut Gregory dan Stuart (1992) bahwa “*pertumbuhan pendapatan perkapita dari waktu ke waktu membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama*”. Tingginya pendapatan per kapita penduduk belum mengartikan bahwa distribusi pendapatannya telah merata, dan mungkin saja terjadi ketimpangan.

Pengurangan ketimpangan (konvergensi) pendapatan per kapita penduduk merupakan kondisi yang menggambarkan semakin kecilnya kesenjangan atau disparitas suatu variabel antar wilayah dalam periode tertentu. Analisis mengenai konvergensi telah dipopulerkan oleh Baumol (1986) dan De Long (1988) yang menemukan adanya bukti empiris pada pendapatan per kapita antarnegara. Selain itu, hasil penelitian Unggul Heriqbaldi (2009) menyatakan tidak terjadi *sigma convergence* (*divergen*) pendapatan pada studi kasus antar kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Setiap pertumbuhan PDRB kabupaten selalu disertai adanya peningkatan gap antar kabupaten.

Hasil penelitian Ridha dan Wahyunadi (2015) menyimpulkan nilai *beta-convergence* berindikasi pada daerah dengan perekonomian miskin cenderung tumbuh lebih cepat dari daerah dengan perekonomian kaya (telah terjadi *catching up*). Penelitian Taosige Wau (2015) menemukan bahwa ketimpangan pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kota di Sumatera Utara mengalami proses konvergensi negatif pada koefisien pendapatan per kapita awal.

Di sisi lain inflasi diduga turut memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Dwi Eko Waluyo (2009), inflasi yaitu salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan dialami hampir di semua negara sebagai kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus-menerus. Inflasi yang tinggi di suatu negara atau daerah akan berdampak negatif bagi perekonomian serta dapat menurunkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil penelitian Ningsih (2010) dalam kajian *Analisis Keterkaitan Dinamis Inflasi di Negara-Negara ASEAN+6* menyatakan bahwa rata-rata tingkat inflasi di antara negara-negara ASEAN+6 semakin kecil (konvergen) pada periode 2000-2009. Pada konvergensi inflasi, jika tingkat inflasinya serupa, atau bergerak kearah yang sama maka akan lebih mudah menentukan target inflasi dan kebijakan yang cocok bagi daerah.

Untuk kondisi di Indonesia, sejak pemberlakuan kebijakan desentralisasi terdapat fakta bahwa tingkat inflasi berfluktuasi lebih tinggi dan disparitas inflasi antar daerah semakin membesar. Dengan kata lain, desentralisasi berpotensi menciptakan *divergensi* inflasi yang berefek negatif bagi penciptaan kesejahteraan sebagai tujuan nasional.

Penelitian Denis Jakson Bimbin di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa tidak terjadi konvergensi inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode yang diteliti sehingga kecenderungan daerah miskin tumbuh lebih lambat dibandingkan daerah kaya dengan demikian daerah miskin lambat mengejar ketertinggalannya dan ketimpangan antar daerah cenderung akan meningkat. Mengingat bahwa kestabilan inflasi merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka penting adanya pengendalian inflasi pada posisi yang rendah dan stabil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat suatu daerah, penulis akan menganalisis perkembangan fluktuasi pendapatan per kapita dan inflasi sekaligus menganalisis ketimpangannya (*gap*) sebagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketimpangan tersebut merupakan selisih variasi pendapatan per kapita (yang dianalogikan oleh Laju Pertumbuhan PDRB ADHK) dengan variasi inflasinya pada periode tahun 2001 sampai dengan 2016.

Jika variasi pendapatan per kapita lebih kecil dari variasi inflasi, maka diindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat relatif lebih baik, sebaliknya akan terjadi kondisi kurang sejahtera jika menghadapi laju kemahalan barang dan jasa di atas laju pendapatan perkapitanya. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada 3 masalah, yaitu:

1. Bagaimana variasi pendapatan per kapita penduduk di masing-masing provinsi?
2. Bagaimana variasi inflasi di masing-masing provinsi?
3. Provinsi mana yang memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan data peristiwa longitudinal sepanjang tahun pengamatan penelitian. Penelitian ini berupaya menginterpretasi variabel variasi Laju Pertumbuhan PDRB ADHK sebagai pendapatan per kapita, variasi inflasi, serta selisihnya untuk ketiga provinsi yang diamati (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur).

Adapun data pendapatan perkapita dan inflasi pada periode pengamatan diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Parameter yang digunakan dalam penelitian adalah koefisien variasi (*coefficient of variation*) atau koefisien dispersi, yaitu perbandingan antara simpangan standar masing-masing pendapatan per kapita dan inflasi dengan nilai rerata masing-masing pendapatan per kapita dan inflasi yang dinyatakan dalam persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat sebaran data

dari rata-rata hitung pendapatan per kapita dan inflasi.

Harga mutlak koefisien variasi dikenal juga sebagai simpangan baku relatif (*relative standard deviation-RSD* dengan notasi c_x) yang merupakan rasio dari standard deviasi (σ) dengan *mean* (μ) yaitu:

$$c_v = \frac{\sigma}{\mu} \dots\dots\dots 1)$$

Rumus tersebut digunakan untuk mengukur suatu populasi sedangkan untuk mengestimasi dari *series* tahun dalam pengamatan waktu tertentu bahwa rumus koefisien variasinya digunakan rumusan koefisien variasi berikut:

$$c_v = \frac{s}{x} \dots\dots\dots 2)$$

dimana:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \dots\dots\dots 3)$$

dan $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \dots\dots\dots 4)$

Jika nilai koefisien variasi tahun tertentu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya maka dapat dikatakan telah terjadi *sigma-convergence*.

Untuk menganalisis identifikasi kesatu dan kedua masing-masing koefisien, variasi laju pendapatan per kapita dan laju inflasi dibandingkan, apakah koefisien variasi antara pendapatan per kapita berbeda dengan inflasi secara signifikan?

Hanie (2006) menyatakan bahwa konvergensi (*convergence*) dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan dari pergerakan satu atau lebih variabel yang menuju suatu titik yang sama.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyusunan data pendapatan perkapita dan inflasi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pada kurun waktu pengamatan data yakni pada periode tahun 2010 s.d. 2015 disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Laju Pendapatan Perkapita (%) dan Inflasi (%)
Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Periode Tahun 2001 s.d. 2015**

Tahun	Jawa Barat		Jawa Tengah		Jawa Timur	
	Inflasi	Pendapatan Perkapita	Inflasi	Pendapatan Perkapita	Inflasi	Pendapatan Perkapita
2001	9,50	1,86	5,93	2,23	13,89	2,72
2001	6,96	1,93	11,52	2,23	9,27	2,79
2003	5,03	2,16	6,07	3,27	4,23	1,57
2004	7,56	3,50	5,98	3,47	5,92	4,66
2005	18,51	5,62	16,46	4,72	15,19	5,21
2006	6,15	6,04	6,50	4,70	6,76	5,17
2007	5,10	4,82	6,24	4,36	6,48	4,67
2008	11,11	6,23	9,55	4,95	9,23	5,30
2009	2,10	4,20	3,33	4,53	3,62	4,47
2010	6,43	6,22	6,88	5,15	6,24	5,96
2011	3,10	6,50	2,68	5,30	4,09	6,44
2012	3,86	6,50	4,24	5,34	4,50	6,64
2013	9,15	6,33	7,99	5,11	7,59	6,08
2014	7,14	5,09	8,22	5,27	7,77	5,18
2015	2,73	5,05	2,73	5,47	3,08	4,80

Sumber: BPS Nasional

Seperti terlihat pada Tabel 1 bahwa tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005, dimana untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 18,51%, Jawa Tengah 16,46%, dan Jawa Timur 15,19%. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan volatilitas harga pangan. Sebaliknya inflasi terendah di Jawa Barat 2,10% (tahun 2009), Jawa Tengah 2,36% (tahun 2016), dan Jawa Timur 2,74% (tahun 2015).

Selanjutnya berdasarkan reratanya, terlihat bahwa rata-rata inflasi selama 16 tahun untuk Jawa Barat 6,73%, Jawa Tengah 6,73% dan Jawa Timur 6,00%. Hal ini dapat dimaknai bahwa inflasi di ketiga provinsi tersebut cukup tinggi, namun secara relatif untuk Jawa Timur relatif lebih rendah dibanding Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Untuk pendapatan per kapita tertinggi Provinsi Jawa Barat 6,50 % di tahun 2011 dan 2012, Jawa Tengah 5,47% (2015), dan Jawa Timur 6,64% (2012). Sementara itu, pendapatan per kapita terendah di Jawa Barat 1,86% (tahun 2001), Jawa Tengah 2,23%

(tahun 2001 dan 2002), dan Jawa Timur 1,57% (tahun 2003).

Untuk rata-rata pendapatan perkapita selama 16 tahun untuk provinsi Jawa Barat 4,86%, Jawa Tengah 4,46% dan Jawa Timur 4,79%. Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam hal pendapatan perkapita penduduk Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dengan mengamati dan membandingkan rerata inflasi dan rerata pendapatan per kapita selama periode pengamatan, ternyata persentase inflasi lebih tinggi dibanding persentase pendapatan perkapita penduduk di ketiga provinsi tersebut. Sehingga dapat dikatakan sebenarnya tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur belumlah dapat dikatakan baik karena dianggap kurang berdaya dan tidak sejahtera.

Berdasarkan Tabel 2 telah dihitung bahwa koefisien variasi rata-rata untuk Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagaimana tertera berikut ini:

Tabel 2. Koefisien Variasi Rata-Rata

Provinsi	Koefisien Variasi Rata-Rata (%)	
	Inflasi	Pendapatan Perkapita
Jawa Barat	0,613134643	0,341476232
Jawa Tengah	0,548376117	0,241761837
Jawa Timur	0,521928412	0,289051967

Sumber: Hasil Pengolahan

Berdasarkan data pada tabel tersebut variasi kenaikan inflasi Jawa Timur terendah, sehingga dimaknai pengendalian inflasi di Jawa Timur relatif konvergen (variasi datanya yang lebih memusat atau kecil) dibanding Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Untuk variasi pendapatan per kapita secara berurut terbesar, dilihat dari rata-ratanya untuk Jawa Barat lebih befluktuasi (divergen) dibanding Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata koefisien variasi rata-rata inflasi di atas pendapatannya. Hal ini dapat dimaknai masyarakat di ketiga provinsi belum dalam kondisi sejahtera, karena ketimpangan rata-rata antara inflasi dengan pendapatan per kapita masih cukup besar.

Komparasi selisih (*gap*) antara koefisien variasi inflasi dengan pendapatan perkapita yang paling kecil adalah Jawa Timur (23,29%) disusul Jawa Barat (27,17%) dan Jawa Tengah (30,66%). Sehingga berdasarkan komparasi *gap* tersebut penduduk Jawa Timur sebenarnya merupakan daerah memiliki *gap* yang paling kecil dibanding Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Strategi yang dapat dilakukan oleh provinsi untuk memperbaiki *lag varian* pendapatan kapita dan inflasi, diantaranya alokasi proporsi sumber daya harus diarahkan secara tepat agar efektif dapat meningkatkan produktivitas individu masyarakat, misalnya melalui program peningkatan *softskill* dan kewirausahaan masyarakat. Sedangkan untuk mengendalikan inflasi, Forum Pengendalian Inflasi Daerah dapat meningkatkan program strategisnya untuk dapat mampu mendeteksi dengan cepat terjadinya inflasi yang tidak wajar, misalnya dengan mengembangkan *Early Warning System (EWS)* sehingga akan dapat dengan dini mengendalikannya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan bahwa pada periode 2001 s.d. 2016 disimpulkan:

1. Variasi/fluktuasi pendapatan per kapita secara berurut dari terbesar yaitu Provinsi Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan urutan dimaksud bahwa rata-rata perubahan pendapatan per kapita Penduduk Jawa Barat setiap

tahunnya lebih bervariasi (lebih berfluktuatif) dari rata-ratanya.

2. Variasi/fluktuasi inflasi di Jawa Timur paling kecil sehingga dianggap rata-rata perkembangan tingkat kemahalan di Jawa Timur relatif lebih rendah dibanding Jawa Tengah dan Jawa Barat.
3. Dengan membandingkan rerata inflasi dan rerata pendapatan per kapita penduduk di masing-masing Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata persentase inflasinya lebih tinggi dibanding persentase pendapatan per kapita, sehingga dimaknai sebenarnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur belum dapat dikatakan baik karena dianggap kurang berdaya dan tidak sejahtera.

V. SARAN/REKOMENDASI

1. Mengingat inflasi dapat memberikan dampak atau pengaruh pada APBD, diharapkan adanya kerjasama yang intens dan berkelanjutan antara pihak Bank Indonesia di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai otoritas moneter dan pemerintah daerah sebagai otoritas fiskal serta instansi atau lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi daerah sehingga tercapai inflasi yang rendah dan stabil.
2. Melakukan pengembangan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi untuk memperbaiki *lag varian* pendapatan perkapita dan inflasi, diantaranya alokasi proporsi sumber daya harus diarahkan secara tepat agar penggunaannya efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas individu masyarakat misalnya melalui program perluasan kesempatan kerja, peningkatan *softskill* dan kewirausahaan masyarakat. Sedangkan untuk mengendalikan inflasi, peran penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat meningkatkan program strategisnya guna mampu mendeteksi dengan cepat terjadinya inflasi yang tidak wajar, misalnya dengan mengembangkan *Early Warning System*

(EWS) sehingga akan dapat mengendalikannya lebih dini.

REFERENSI

- Baumol, William. (1986). Productivity Growth, Convergence, and Welfare. *American Economic Review*, 76:1072-1085
- De Long, J. Bradford. (1988). Productivity Growth, Convergence, and Welfare: Comment.
- Dwi Eko Waluyo. (2009). *Ekonomika Makro*, Malang, UMM Press.
- Gregory Paul. R and Robert C Stuart. (1992). *Comparative Economic System*. Fourth Edition. New jersey: Hougton Meffin Company.
- Heqbaldi, Unggul. (2009) Konvergensi Tingkat Pendapatan Studi Kasus 3 Provinsi di Pulau Jawa. *Journal of Indonesian Applied Economics* Vol. 3, No. 1. *Publisher: Journal of Indonesian Applied Economics*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Hanie. (2006). Analisis Konvergensi Nominal dan Riil Diantara Negara-negara ASEAN-5, Jepang, dan Korea Selatan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ningsih, Ratna. (2010). Analisis Keterkaitan Dinamis Inflasi di Negara-Negara ASEAN+6. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Ridha, Wahyunandi. (2007). *Model Kesejahteraan Petani di Area Pertanian Rawan Bencana Nusa Tenggara Barat*. Universitas Mataram.
- Taosige Wau. (2015). Konvergensi Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nias Selatan*. SNEMA. Padang.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat Statistik Indonesia Tahun (2002-2018). Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik <http://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2002-2019), Jawa Barat Dalam Angka, Bandung. <http://www.jabar.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2002-2018), Jawa Tengah Dalam Angka, Semarang. <http://www.jateng.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik (2001-2018), Jawa Timur Dalam Angka, Surabaya. <http://www.jatim.bps.go.id>.